

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Dari penelitian yang telah dilaksanakan melalui analisis data, observasi, dan wawancara secara deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan teori pengawasan yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan penting yang mendukung optimalnya Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka yaitu dengan tahapan Menetapkan Standar Pelaksanaan Kegiatan, Menentukan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Melakukan Pengukuran terhadap Pelaksanaan Kegiatan, Melakukan Perbandingan antara Standar dengan Pelaksanaan Kegiatan dan Menganalisa Penyimpangan, serta Melakukan Koreksi Apabila terjadi Penyimpangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka dinilai cukup baik dalam hal perencanaan dimulai dari penetapan standar, sosialisasi, penetapan target, penetapan jadwal, dan pengukuran perencanaan. Meski baik dalam perencanaan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan PPDB SMA belum berjalan secara optimal disebabkan oleh kurangnya pengawasan secara menyeluruh dari Pengawas Sekolah. Dalam

---

<sup>1</sup> Sarinah & Magdalena, 2017. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 105

pelaksanaan PPDB SMA, pengawas sekolah belum melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh melainkan hanya secara preventif melalui sosialisasi dan secara tidak langsung melalui laporan dari panitia pelaksana. Secara tidak langsung Pengawas Sekolah seolah mengabaikan fungsi pengawasan secara langsung yang justru menjadi fokus utama dalam pengawasan. Oleh sebab itu, muncul penyimpangan dari pihak CPDB yang tidak diketahui oleh pengawas sekolah dan pada akhirnya menghambat efektivitas pengawasan PPDB SMA tersebut. Penyimpangan yang dimaksud diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka setelah pelaksanaan PPDB SMA selesai dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka hanya sebatas melakukan evaluasi pada panitia dan teguran pada CPDB yang melakukan penyimpangan. Namun sayangnya tidak ada pelatihan lebih lanjut kepada panitia pelaksana untuk dapat mencegah adanya penyimpangan di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, pendekatan teori dari Handoko belum dilengkapi dengan adanya keterbukaan publik dari pemerintah kepada masyarakat dan pihak sekolah perihal pengawasan PPDB SMA. Apabila ruang media bagi masyarakat dan pihak sekolah tidak tersedia, maka tidak akan ada pula timbal balik pengawasan dari masyarakat dan pihak sekolah kepada pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka.

Perlu diperhatikan pula bahwa mekanisme PPDB SMA yang dapat diperbaiki dalam hal ini adalah melaksanakan pengawasan selama PPDB SMA berlangsung dan

melaporkannya secara berkala kepada Staf Pelayanan sebagai penanggung jawab program, agar selanjutnya penyimpangan dapat dianalisa sedini mungkin untuk menghindari adanya masalah berkelanjutan yang dapat menghambat tercapainya tujuan.

Faktor pendukung dalam pengawasan PPDB SMA terdiri atas selarasnya pemahaman prosedural PPDB SMA antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka dan pihak panitia PPDB SMA, lokasi kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka berada pada wilayah strategis, dan adanya pembagian tugas yang jelas antara Staf Pelayanan sebagai penanggung jawab dan Pengawas Sekolah sebagai pihak yang secara langsung mengawasi PPDB SMA. Sementara untuk faktor penghambat antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pihak pendaftar yang belum memahami bahwa prosedur yang berlaku merupakan produk hukum, keterbatasan waktu untuk mensurvei lokasi tempat tinggal CPDB yang menyebabkan setiap SMA hanya mengambil sampel, dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dan pengawas yang menyebabkan penyelesaian masalah dilakukan internal tanpa melaporkan kepada Cabang Dinas untuk menghindari adanya penilaian terhadap kurangnya kinerja sekolah dalam menjalankan tugas.

Upaya yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka untuk meminimalisasi setiap hambatan dalam Pengawasan PPDB SMA adalah melalui evaluasi secara berkala dan pemberian *feedback* kepada masyarakat melalui pembinaan terhadap siswa yang bersangkutan.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Akademis**

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang berbagai regulasi pemerintah terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru diharapkan untuk dapat mengkaji lebih dalam perihal prosedur dan kebijakan yang ditentukan dalam rangka lebih memperbaiki dan lebih melengkapi hasil penelitiannya, serta dapat menghasilkan *output* yang lebih bermanfaat untuk masa yang akan datang.

### **5.2.2. Praktis**

Sebagai instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, diharapkan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi sesuai yang ada dalam aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka :

1. Disarankan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan secara optimal dari mulai preventif, represif, secara langsung, tidak langsung, internal, dan eksternal.
2. Diharapkan dapat memfasilitasi ruang publik sebagai wujud dari keterbukaan atau transparansi program dan kegiatan terhadap masyarakat dan pihak sekolah yang terlibat untuk dapat memperoleh timbal balik pengawasan dari pihak yang diawasi.
3. Mekanisme PPDB SMA sebaiknya dilakukan secara berkala selama PPDB SMA berlangsung dan diketahui secara menyeluruh oleh Bagian Pelayanan sebagai penanggung jawab program tersebut.